



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

SEJARAH INDONESIA



KELAS
XII



**PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI
BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL
REFORMASI**

SEJARAH INDONESIA KELAS XII

PENYUSUN

MARIANA, M.Pd

SMAN 10 BEKASI

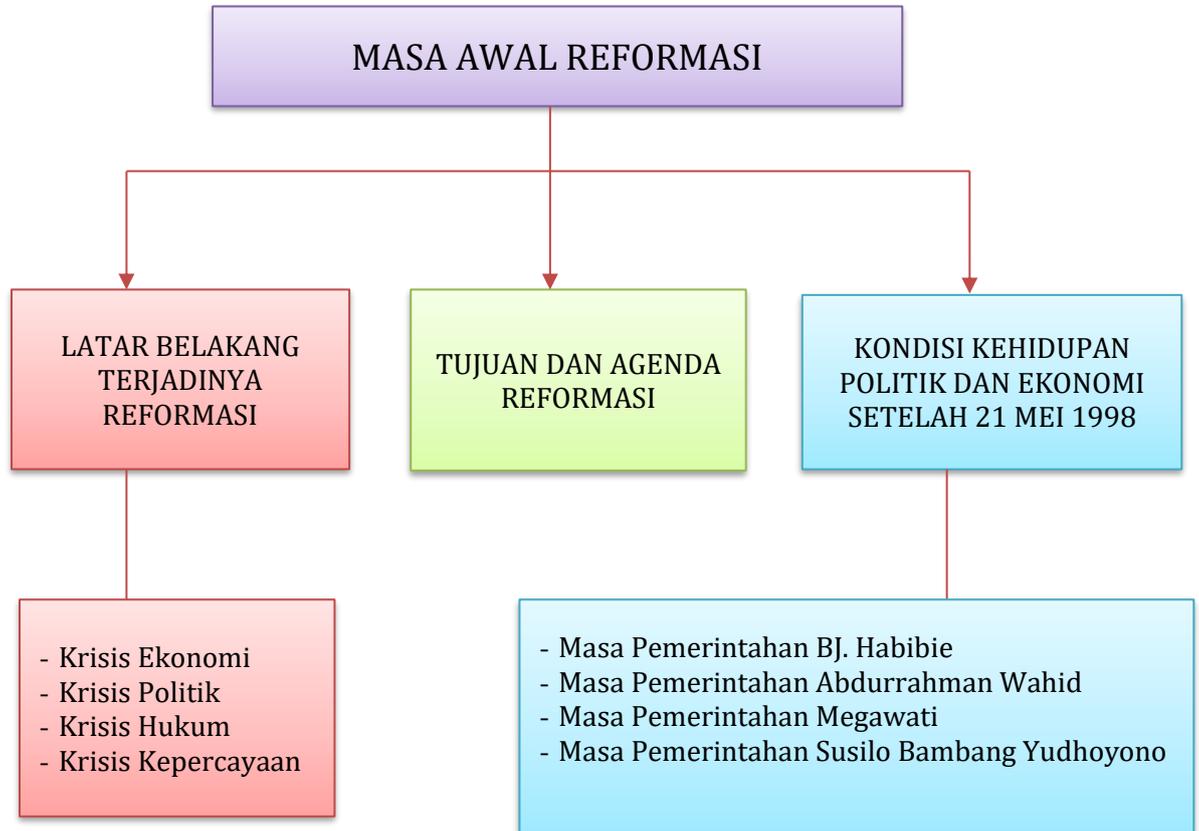
DAFTAR ISI

PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
PETA KONSEP	v
PENDAHULUAN	1
A. Identitas Modul	1
B. Kompetensi Dasar	1
C. Deskripsi Singkat Materi	1
D. Petunjuk Penggunaan Modul	2
E. Materi Pembelajaran	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	3
REFORMASI	3
A. Tujuan Pembelajaran	3
B. Uraian Materi	3
1. Latar belakang Reformasi	4
2. Agenda Reformasi	6
3. Jalannya Reformasi	8
C. Rangkuman	9
D. Penugasan Mandiri.....	10
E. Latihan Soal	10
F. Penilaian Diri	13
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	14
KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI	14
A. Tujuan Pembelajaran	14
B. Uraian Materi	14
1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie.....	14
2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.....	19
3. Masa Pemerintahan Megawati	21
4. MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	23
C. Rangkuman	24
D. Latihan Soal	25
E. Penilaian Diri	26
EVALUASI	27
DAFTAR PUSTAKA	31

GLOSARIUM

- Buloggate** : kasus yang melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan.
- Brunaigate** : penyaluran dana sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor.
- Demokrasi** : bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
- IMF** : (International Monetary Fund) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Dana Moneter Internasional adalah sebuah lembaga donor internasional
- Poros Tengah** : istilah yang mengacu kepada koalisi partai-partai Islam yang dibentuk Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P) memenangkan Pemilihan Umum Legislati Indonesia 1999
- Privatisasi** : menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.
- Reformasi** : Sebuah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit
Judul Modul	: Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Awal Reformasi

B. Kompetensi Dasar

3.6	Menganalisis Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Awal Reformasi
4.6	Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis

C. Deskripsi Singkat Materi



Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa orde baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

-  BACALAH MODUL INI HINGGA TUNTAS DAN PAHAM
-  IKUTI PETUNJUK KEGIATAN BELAJAR YANG ADA PADA MODUL
-  CEK PEMAHAMANMU MELALUI KEGIATAN EVALUASI
-  BELAJARLAH SECARA MANDIRI JIKA MEMERLUKAN BANTUAN HUBUNGI GURU
-  JANGAN MELIHAT KUNCI JAWABAN SEBELUM MENGERJAKAN EVALUASI
-  COCOKAN HASIL PEKERJAANMU DENGAN KUNCI JAWABAN YANG ADA
-  JIKA NILAIMU MASIH KURANG , BELAJARLAH LAGI PEMAHAMAN TENTANG MATERI TERSEBUT

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Latar belakang terjadinya Reformasi

Kedua : Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Masa Awal Reformasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

REFORMASI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menyimpulkan:

1. Latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia
2. Agenda reformasi di Indonesia
3. Jalannya reformasi di Indonesia

B. Uraian Materi

Perjalanan panjang sejarah Orde Baru di Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sehingga mendapat kepercayaan dalam dan luar negeri. Mengawali perjalannya pada dasawarsa 60-an rakyat sangat menderita pelan-pelan keberhasilan pembangunan melalui tahapan dalam pembangunan lima tahun (Pelita) sedikit demi sedikit kemiskinan rakyat dapat dientaskan. Sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah Orde Baru yang berhasil membangun negara, Presiden Soeharto diangkat menjadi "Bapak Pembangunan".



Ternyata keberhasilan pembangunan tersebut tidak merata, maka kemajuan Indonesia ternyata hanya semu belaka. Ada kesenjangan yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin. Rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat ditandai dengan merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Protes dan kritik masyarakat seringkali dilontarkan namun pemerintah Orde Baru seolah-olah tidak melihat, dan mendengar, bahkan masyarakat yang tidak setuju kepada kebijaksanaan pemerintah selalu dituduh sebagai "PKI", subversi, dan sebagainya.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai membung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, seakan menjerit



lebih-lebih banyak perusahaan yang terpaksa melakukan "PHK" karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar sangat rendah. Disinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998, dengan berani meneriakkan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan

VII dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya tanggal 21 Mei 1998 dengan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie.

1. Latar belakang Reformasi

A. Krisis Ekonomi

Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia ternyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00 menjadi Rp. 2.603,00 pada 1 Agustus 1997. Tercatat di bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai R. 5.000,00 perdolar, bahkan mencapai angka Rp. 16.000,00 perdolar pada sekitar Maret 1997.



Nilai tukar rupiah semakin melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya iklim bisnis. Kondisi moneter mengalami keterpurukan dengan dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit Likuidasi Bank Indonesia (K.LBI), ternyata tidak membawa hasil sebab pinjaman BLBI terhadap bank bermasalah tersebut tidak dapat mengembalikan. Dengan demikian pemerintah harus menanggung beban utang yang cukup besar. Akibatnya kepercayaan dunia internasional mulai menurun. Krisis moneter ini akhirnya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia.

a. Utang Negara Republik Indonesia.

Penyebab krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar, terhitung bulan Pebruari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat: utang swasta nasional Rp. 73,962 miliar dolar AS + utang pemerintah Rp. 63,462 miliar dolar AS, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang-Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS), RADIUS Prawiro sesuai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.

Perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal harganya. Mereka tidak percaya kepada para importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya. Hampir semua negara tidak mau menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat karena kolusi dan korupsi.

b. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Meskipun gross national product (GNP) pada masa Orba pernah mencapai diatas US\$ 1.000,00 tetapi GNP tersebut tidak menggambarkan pendapatan rakyat sebenarnya, karena

uang yang beredar sebagian besar dipegang oleh orang kaya dan konglomerat. Rakyat secara umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar. Pengaturan perekonomian pada masa Orde Baru sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi.

c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahimya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara tapi tidak dapat dihentikan karena dibelakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum.

d. Politik Sentralisasi

Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya pemerintah daerah tidak 'punya peran yang signifikan. Dalam bidang ekonomi sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat pembagian yang tidak adil inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah. Akibatnya mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat terutama terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya (Papua). Proses sentralisasi bisa dilihat adanya pola pemberitaan pers yang Jakarta sentries. Terjadinya banjir informasi dari Jakarta (pusat) sekaligus dominasi opini dari pusat.

B. Krisis Politik



Krisis politik pada akhir orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Golkar yang pada mulanya disebut sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya, lahir dari usaha untuk menggalang organisasi-organisasi masyarakat dan angkatan bersenjata,

muncul satu tahun sebelum peristiwa G30S/PKI tepatnya lahir pada tanggal 20 Oktober 1964.

Dan memang tidak dapat disangkal bahwa organisasi ini lahir dari pusat dan dijabarkan sampai ke daerah-daerah. Disamping itu untuk tidak adanya loyalitas ganda dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil maka Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang lahir tanggal 29 Nopember 1971 ikut menggabungkan diri ke dalam Golongan Karya. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun, karena tidak ada satupun kritik dari infra struktur politik ini yang berani mencundangi dirinya.

Kemenangan Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik di Indonesia dan para peninjau asing dalam pemilu yang tidakjujur dan adil (jurdil) penuh ancaman dan intimidasi terhadap para pemilih di pedesaan. Dengan diikuti dukungan terhadap Jenderal (Purn) Soeharto selaku ketua dewan pembina Golkar untuk dicalonkan kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR tahun 1998 ternyata mayoritas anggota DPR/MPR mendukung Soeharto menjadi presiden untuk periode 1998-2003.

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan masa pemerintahan Orde Baru, kedaulatan rakyat ada ditangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa. Kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya MPR dilaksanakan de jure secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme).

Rasa ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan reformasi. Kaum reformis yang dipelopori mahasiswa, dosen, dan rektornya menuntut pergantian presiden, reshuffle kabinet, Sidang Istimewa MPR, dan pemilu secepatnya. Gerakan menuntut reformasi total disegala bidang, termasuk anggota DPR/MPR yang dianggap penuh dengan KKN dan menuntut pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Gerakan reformasi menuntut pembaharuan lima paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu: (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum; (2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, Tugas, dan wewenang DPR/MPR; (3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya; (4) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Referendum; (5) UU No. 1 Tahun 1985 tentang organisasi masa.

C. Krisis Hukum.

Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan dibidang hukum, dalam kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi kenyataannya mereka dibawah eksekutif. Dengan demikian pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa. Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan.

Reformasi diperlukan aparaturnya penegak hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan hakim, penyidik dan penuntut, penasehat hukum, konsultan hukum dan kesiapan sarana dan prasarana.

D. Krisis Kepercayaan

Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga disana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya system politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia.

2. Agenda Reformasi

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998 ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah-masalah sosial. Dengan

kondisi seperti itu mengundang keprihatinan rakyat, yang akhirnya memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi.

Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Amandemen UUD 1945.
3. Penghapusan dwifungsi ABRI.
4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
5. Supremasi hukum.
6. Pemerintahan yang bersih dari KKN.
7. Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut mengandung dua kelemahan.

Kelemahan pertama terletak pada posisi dana bantuan itu, karena pemberian dana bantuan tersebut adalah utang luar negeri yang harus dibayarkan kembali oleh Indonesia beserta dengan bunganya walaupun dengan persentase yang rendah. Kelemahan kedua adalah penerapan Structural Adjustment Program (Program Penyesuaian Struktural) dari IMF yang menyertai penurunan dana bantuan tersebut. Structural Adjustment Program adalah persyaratan IMF bagi Indonesia dalam empat bidang utama (pengetatan kebijaksanaan fiskal, penghapusan subsidi, menutup 16 bank di Indonesia, dan memerintahkan bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga). Dengan penerapan Structural Adjustment Program tidak terwujud dalam perbaikan ekonomi nasional signifikan.

Demo mahasiswa



Dengan banyaknya aksi demonstrasi, membuat aparat keamanan kewalahan dan bertindak keras terhadap aksi tersebut. Akibatnya bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak dapat dicegah. Pada tanggal 12 Mei 1996 mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan dengan aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march menuju gedung DPR/MPR.



Dalam insiden tersebut empat mahasiswa tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Empat mahasiswa tersebut adalah: Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto.

Mereka mendapat gelar Pahlawan Reformasi. Sebelum insiden Tri Sakti tersebut, di Jogjakarta seorang mahasiswa yang bernama Moses Gatotkaca tewas ketika melakukan aksi menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Moses Gatotkaca meninggal pada tanggal 8 Mei 1998.

Kejadian Tri Sakti tersebut memicu terjadinya kerusuhan massa pada tanggal 13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia. Pascatragedi ini suasana Jakarta sangat tegang, hingga digelarnya aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 19 Mei 1998 oleh para mahasiswa. Mereka melakukan Long March menuju gedung DPR/MPR dengan tujuan menuntut turunnya Presiden Soeharto, menggelar Sidang istimewa MPR, dan pelaksanaan reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara. Di Jogjakarta mahasiswa dan masyarakat berkumpul di alun-alun mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VII mengenai kondisi negara yang sedang tegang. Inti dari maklumat tersebut adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembentukan Komite Reformasi

Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang sembilan tokoh masyarakat ke Istana Negara dengan agenda membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Sembilan tokoh tersebut adalah:

1. Nur Cholis Madjid
2. Abdurahman Wahid
3. Emha Ainun Nadjib
4. Ali Yafie
5. Malik Fadjar
6. Cholis Madjid Baidlowi
7. Sutrisno Muhdam
8. Ma'aruf Amir
9. Ahmad Bagdja

Dalam pertemuan tersebut sepakat membentuk Komite Reformasi. Tugas komite ini adalah menyelesaikan UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR serta DPRD, UU Anti-Monopoli, UU Anti-Korupsi dan lainnya.

3. Jalannya Reformasi

Berbagai tokoh masyarakat seperti Amien Rais dan Emil Salim menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut, penyebabnya adalah presiden meminta pemberian waktu enam bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Namun, hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas pertemuan itu selesai. Emil Salim dengan melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser keprabon (turun dari tahta kekuasaan) pada saat itu juga, yaitu tanggal 20 Mei 1998.



Pada tanggal 20 Mei 1998 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright

memberikan pernyataan yang meminta Presiden Soeharto untuk segera mundur. Madeleine menyatakan bahwa pengunduran diri Soeharto sudah semestinya dilakukan untuk memberikan jalan bagi transisi demokrasi di Indonesia dan kesempatan ini merupakan momentum bagi Presiden Soeharto untuk menorehkan langkah historisnya sebagai negarawan.

Pada pukul 14.30 tanggal 20 Mei 1998 sejumlah 14 menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, menyatakan penolakannya untuk dicalonkan kembali dalam Kabinet Reformasi. Pada pukul 16.45, perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPR/MPR mengaakan pertemuan di lantai 3 gedung lama MPR/DPR. Dalam pertemuan tersebut mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat, tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998 pimpinan DPR akan mempersiapkan Sidang Istimewa MPR.

Akibat adanya desakan dari para mahasiswa dan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 19.06 WIB Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi presiden Republik Indonesia. Bertempat di Credential Room, Istana Negara Jakarta dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung. Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI. Naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra dengan judul "Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden RI".



Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi "Jika Presiden Mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya".

Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun di Republik Indonesia.

C. Rangkuman

Munculnya Reformasi di Indonesia disebabkan oleh:

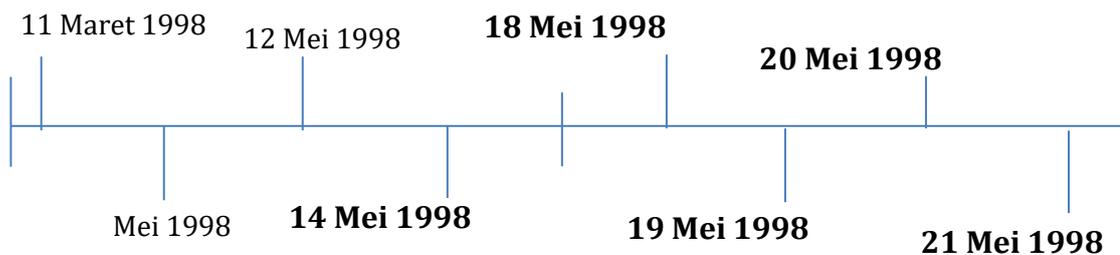
1. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum
2. Pemerintah Orde baru tidak konsisten dan konsekwen terhadap tekad awal munculnya orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Munculnya suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya (status quo)
4. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.
5. Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan.
6. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.

Setelah BJ Habibie dilantik menjadi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Terjadinya gerakan Reformasi adalah akumulasi dari berbagai macam krisis (krisis multidimensi) yang sudah berlangsung sejak pertengahan masa pemerintahan Orde Baru berupa krisis ekonomi, krisis politik, krisis social, krisis hokum , krisis kepercayaan berwujud ketidak puasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan masa Orde Baru yang selama berpuluh tahun dipendam , karena berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya layaknya bom waktu ketidak puasan itu meledak berwujud aksi aksi yang menuntut mundurnya Suharto dari tampuk kepresidenan sehingga membawa bangsa Indonesia dalam sebuah alam baru yaitu alam reformasi.

D. Penugasan Mandiri

TIME LINE DETIK-DETIK LENGSENYA PRESIDEN SOEHARTO



BUATLAH KETERANGAN PERISTIWA SESUAI TANGGAL DI ATAS

E. Latihan Soal

Berilah tanda silang pada pilihan yang menurut kalian paling tepat

1. Berikut ini adalah beberapa factor ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi menjelang kejatuhan pemerintah Orde Baru dan menjadi awal masa Reformasi , **Kecuali**
 - A. pemerintah Indonesia gagal mengatasi krisis moneter yang melanda Dunia sejak tahun 1996.yang mengakibatkan nilai rupiah terus melemah terhadap dolar
 - B. pembangunan Proyek Proyek Raksasa (Mega Proyek) sudah menghabiskan dana besar sehingga mengakibatkan anggaran negara mengalami deficit setiap tahunnya.
 - C. pondasi Pembangunan Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru adalah bersumber dari hutang Luar Negeri .
 - D. pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru menyimpang dari landasan Ekonomi Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

- E. ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah akibat Pola pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan banyak kekayaan dari daerah yang disedot oleh pemerintah pusat.
2. Krisis Moneter yang melanda Dunia terutama Negara Negara berkembang di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 dimulai ketika
- A. seorang spekulan Amerika Serikat yaitu George Soros melakukan aksi borong Dollar AS sehingga mengakibatkan nilai Dollar melonjak sebaliknya nilai mata uang Negara Negara di Asia Tenggara turun drastic.
 - B. harga minyak dunia melonjak sehingga mengakibatkan naiknya pula harga BBM di Negara Negara Asia.
 - C. Amerika melancarkan invasi ke wilayah ladang minyak Irak sehingga mengakibatkan terjadinya krisis minyak dunia.
 - D. memanasnya hubungan Amerika dengan Uni Soviet mengakibatkan lesunya perdagangan dunia
 - E. terjadinya perubahan pola ekonomi Global
3. Runtuhnya pemerintah Orde Baru adalah hasil akumulasi dari berbagai macam Krisis, salah satunya adalah Krisis Politik. Faktor politik yang mendorong terjadinya krisis politik di tanah air menjelang kejatuhan pemerintah Orde Baru dan menjadi awal masa Reformasi diantaranya adalah
- A. perpecahan di tubuh Golkar sehingga terbagi menjadi dua.
 - B. adanya tuntutan dari lawan lawan politik Golkar atas kemenangan Golkar dalam setiap Pemilu.
 - C. kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai tidak wajar
 - D. adanya campur tangan Amerika dalam setiap kebijakan kebijakan politik pemerintah mengundang kemarahan rakyat.
 - E. terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1997 mengakibatkan rakyat tidak percaya terhadap hasil Pemilu tahun 1997.
4. Beberapa agenda yang disuarakan para mahasiswa dalam gerakan reformasia adalah sebagai berikut, *kecuali*.....
- A. Adili Suharto dan kroni – kroninya
 - B. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
 - C. Pemerintahan yang bersih dari KKN
 - D. Otonomi daerah yang seluas – luasnya
 - E. Menciptakan satabilitas nasional
5. Hal pokok dari tujuan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah
- A. memberdayakan peran lembaga tinggi negara agar lebih peduli terhadap kepentingan rakyat
 - B. mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah
 - C. mengembalikan harta kekayaan pejabat Orde Baru yang korupsi kepada rakyat
 - D. menuntut para pengusaha untuk melunasi hutang hutang luar negerinya
 - E. memperbarui tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

1. Kunci Jawaban : B
Pembahasan
Pembangunan Proyek Proyek Raksasa (Mega Proyek) sudah menghabiskan dana besar sehingga mengakibatkan anggaran negara mengalami deficit setiap tahunnya adalah sebab buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin
2. Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia ternyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar , pada sekitar bulan Maret 1997. Nilai tukar rupiah semakin melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya iklim bisnis.
3. Kunci Jawaban : C
Pembahasan
Krisis politik pada akhir orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas.
4. Kunci Jawaban : E
Pembahasan
Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998 Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut:
 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
 2. Amandemen UUD 1945.
 3. Penghapusan dwifungsi ABRI.
 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
 5. Supremasi hukum.
 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN.
 7. Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut mengandung dua kelemahan.
5. Kunci Jawaban : E
Pembahasan :
Memperbarui tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat

F. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

NO	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah kamu dapat menjelaskan <i>PENGERTIAN</i> Reformasi		
2	Apakah kamu dapat menjelaskan latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998		
3	Apakah kamu dapat menjelaskan agenda para tokoh-tokoh reformis dalam perubahan Indonesia dalam berbagai aspek		
4	Apakah kamu dapat menyimpulkan jalannya reformasi di Indonesia tahun 1998		
5	Apakah kamu dapat menuliskan secara runut dan kronologi / timeline peristiwa reformasi yang berakhir pada lengsernya presiden Soeharto?		

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang :

1. Kehidupan politik pada masa awal Reformasi
2. Kehidupan ekonomi pada masa awal Reformasi

B. Uraian Materi

Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya.

Tugas B.J. Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dilakukan oleh presiden untuk menjawab tantangan era reformasi.

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA AWAL REFORMASI

1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

a. Awal pemerintahan BJ. Habibie

Naiknya Habibie menggantikan Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli hukum, ada yang mengatakan hal itu konstitusional dan inskonstitusional. Yang mengatakan konstitusional berpedoman Pasal 8 UUD 1945, "*Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya*". Adapun yang mengatakan inskonstitusional berlandaskan ketentuan Pasal 9 UUD 1945, "*Sebelum Presiden meangku jabatan maka Presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR atau DPR*". Secara hukum materiel Habibie menjadi presiden sah dan konstitusional. Namun secara hukum formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hokum yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto kepada Habibie harus melalui acara resmi konstitusional. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk bersidang, maka harus ada alasan yang kuat dan dinyatakan sendiri oleh DPR.

b. Langkah-langkah Pemerintahan Habibie.

1) Pembentukan Kabinet.

Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer (TNI-Polri), PPP, Golkar, dan PDI.

2) Upaya Perbaikan Ekonomi.

Dengan mewarisi kondisi ekonomi yang parah "*Krisis Ekonomi*" Presiden B.J. Habibie berusaha melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

- a. Merekapitalisasi perbankan.
- b. Merekonstruksi perekonomian nasional.
- c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
- d. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga dibawahRp. 10.000,00
- e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.

3) Reformasi di Bidang Politik.

Presiden mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencanakan pemilu yang jujur dan adil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betul representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana politik diantaranya yaitu: (1) DR. Sri Bintang Pamungkas dosen Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. (2) Mochtar Pakpahan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan dalam tahun 1994.

4) Kebebasan Menyampaikan Pendapat.

Kebebasan ini pada masa sebelumnya dibatasi, sekarang masa Habibie dibuka selebar-lebarnya baik menyampaikan pendapat dalam bentuk rapat umum dan unjuk rasa. Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan manifestasi proses demokratisasi. Maka banyak kalangan mempertanyakan mengapa para pelaku unjuk rasa ditangkap dan diadili. Untuk menghadapi para pengunjuk rasa Pemerintah dan DPR berhasil menciptakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang "*kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum*".

Diberlakukannya undang-undang tersebut bukan berarti keadaan menjadi tertib seperti yang diharapkan. Seringkali terjadi pelanggaran oleh pengunjuk rasa maupun aparat keamanan, akibatnya banyak korban dari pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Hal ini disebabkan oleh: (1) Undang-undang ini belum begitu memasyarakat. (2) Pengunjuk rasa memancing permasalahan, dan membawa senjata tajam. (3) Aparat keamanan ada yang terpancing oleh tingkah laku pengunjuk rasa sehingga tidak dapat mengendalikan diri. (4) Ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan suasana panas agar negara menjadi kacau.

Krisis ini merupakan momentum koreksi historis bukan sekedar lengsemya Soeharto dari kepresidenan tapi yang paling penting membangun kelompok sipil lebih berpotensi untuk membongkar praktek KKN, otonomi daerah, dan lain-lainnya. Dimana krisis multidimensi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik yaitu kurang memperhatikan tuntutan otonomi daerah sebab sebab segala kebijakan untuk daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat.

5) Masalah Dwi Fungsi ABRI

Gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI maka petinggi militer berkeinginan melakukan reorientasi dan reposisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan politik.

Pada era reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi

Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan udara.

6) Reformasi di Bidang Hukum

Pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaharuan bidang hukum namun dalam realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elitnya. Misalnya UU Ketenagakerjaan tetap saja adanya dominasi penguasa. DPR selama orde baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak penguasa bukan memihak kepentingan masyarakat.

Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan keadaan demokratis dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk pembongkaran dan reformasi hukum. Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu: substansi hukum, aparaturnya yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat kreatifitas masyarakat. Adanya praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

7) Sidang Istimewa MPR

Salah satu jalan untuk membuka kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat ditengah-tengah tuntutan reformasi total pemerintah melaksanakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 10-13 Nopember 1998, diharapkan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan perdebaatan yang lebih segar, dan terbuka. Pada saat sidang berlangsung ternyata diluar gedung DPR/MPR Senayan suasana kian memanas oleh demonstrasi mahasiswa dan massa sehingga anggota MPR yang bersidang mendapat tekanan untuk bekerja lebih keras, serius, cepat sesuai tuntutan reformasi.

Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan, yaitu:

- a. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang: Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
- b. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
- c. Tap MPR No. XH/MPR/1998 tentang: Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- d. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang: Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- e. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- f. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang: Hak Asasi Manusia.
- g. Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang: Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR Nomor: I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPR yang terakhir Nomor: I/MPR/1998.
 - h. Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang: Perubahan dan Penambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.
 - i. Tap MPR No. III/V/MPR/1998 tentang: mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum.

j. Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang: mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.

k. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang: mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

l. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang: mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.



8) Pemilihan Umum 1999

Faktor politik yang penting untuk memulihkan krisis multidimensi di Indonesia yaitu dilaksanakan suatu pemilihan umum supaya dapat keluar dari krisis diperlukan pemimpin yang dipercaya rakyat.

Asas pemilihan umum tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) *Langsung* Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara.
- 2) *Umum*, bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih.
- 3) *Bebas*, tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun/pihak manapun.
- 4) *Rahasia*, tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun
- 5) *Jujur*, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara langsung) harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai aturan yang berlaku.
- 6) *Adil*, bahwa pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie



menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum. Maka dicabutlah lima paket undang-undang tentang politik yaitu UU tentang (1) Pemilu, (2) Susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang DPR/MPR, (3) Parpol dan Golongan Karya, (4) Referendum, (5) Organisasi Masa. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru yang diratifikasi

pada tanggal 1 Februari 1999 oleh Presiden B.J. Habibie yaitu: (1) UU Partai Politik, (2) UU Pemilihan Umum, dan (3) UU Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Adanya undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia, sehingga muncul partai-partai politik yang jumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 112 partai politik yang lahir dan mendaftar ke Departemen Kehakimam namun setelah diseleksi hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu.

Pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil pemerintah dan parpol peserta pemilu. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari

Kamis, 7 Juni 1999 berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Dalam perhitungan akhir hasil pemilu ada dua puluh satu partai politik meraih suara untuk menduduki 462 kursi anggota DPR, yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD1-P)	: 153 kursi.
2. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	: 120 kursi.
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: 58 kursi.
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: 51 kursi.
5. Partai Amanat Nasional (PAN)	: 34 kursi.
6. Partai Bulan Bintang (PBB)	: 13 kursi
7. Partai Keadilan (PK)	: 7 kursi
8. Partai Nahdiarul Ummah (PNU)	: 5 kursi
9. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	: 5 kursi
10. Partai Keadilan Persatuan (PKP)	: 4 kursi
11. Partai Demokrasi Indonesia	: 2 kursi
12. Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	: 1 kursi
13. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	: 1 kursi
14. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	: 1 kursi
15. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	: 1 kursi
16. PNI-Masa Marhaen	: 1 kursi
17. PNI-Front Marhaen	: 1 kursi
18. Partai Persatuan (PP)	: 1 kursi
19. Partai Daulat Rakyat (PDR)	: 1 kursi
20. Partai Bhineka Tunggal Ika (FBI)	: 1 kursi
21. Partai Katholik Demokrat (PKD)	: 1 kursi
22. TNI/POLRI	: 46 kursi

9) Sidang Umum MPR Hasil Pemilu 1999

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketuai oleh Jenderal (Pum) Rudini menetapkan jumlah anggota MPR berdasarkan hasil pemilu 1999 yang terdiri dari anggota DPR (462 orang wakil dari parpol dan 38 orang TNI/Polri), 65 orang wakil-wakil Utusan Golongan, dan 135 orang Utusan Daerah. Maka MPR melaksanakan Sidang Umum MPR Tahun 1999 tanggal 1-21 Oktober 1999. Sidang mengesahkan Prof. DR. H. Muhammad Amin Rais, MA (PAN) sebagai Ketua MPR, dan Ir. Akbar Tandjung (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR.

Dalam pencalonan presiden muncul tiga nama calon yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu KH Abdurrahman Wahid (PKB), Hj Megawati Soekamoputri (PDI-P), Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc (PBB), Namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Hasil pemilihan dilaksanakan secara voting KH. Abdurrahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati mendapat 313 suara, dan 5 abstein. Dalam pemilihan wakil presiden dengan calon Hj Megawati Soekamoputri (PDI-P) dan DR. Hamzah Haz (PPP) dimenangkan oleh Megawati Soekamoputri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekamoputri menyusun Kabinet Persatuan Nasional, yang terdiri dari: 3 Menteri Koordinator (Menko Polkam, Menko Ekuin, dan Menko Kesra), 16 menteri yang memimpin departemen, 13 Menteri Negara.

2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid

a. Awal pemerintahan

Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden, memunculkan dua calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid semakin solid, setelah calon Presiden Yusril Ihza Mahendra dari Fraksi Partai Bulan Bintang mengundurkan diri.



Pada pemilu yang di selenggarakan pada 1999, PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak, tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Adanya suara suara keberatan jika Megawati terpilih sebagai Presiden terutama dari partai partai Islam mendorong Amin Rais pada tanggal 7 Oktober 1999 membentuk Poros Tengah yang merupakan koalisi partai partai Islam.

Maka melalui Voting Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak ke 2 saat itu, dipilih sebagai presiden Indonesia ke-4 untuk masa bakti 1999 – 2004 dan dilantik dengan Ketetapan MPR No VII/MPR/1999. Tanggal 21 Oktober 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid

K.H. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihannya berjalan dengan demokratis dan transparan. Beliau yang biasa disebut Gus Dur dicalonkan sebagai presiden oleh Poros Tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang.

Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas-tugas yang akan dijalankannya, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan rakyat.
2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran.
3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.
4. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.

Ketika hubungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Poros Tengah tidak harmonis, DPR mengeluarkan Memorandum I dan II untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Sebagai reaksi baliknya, presiden



mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Mei 2001, yang antara lain isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.

b. Langkah langkah kebijakan Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Selama masa pemerintahannya , pemerintah Abdurrahman wahid mengeluarkan kebijakan kebijakan yang beberapa diantaranya dinilai kontroversial, yang juga berakibat pada renggangnya hubungan dengan unsur unsur Lembaga negara yang lainnya

Kebijakan Kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid , diantaranya :

- 1) Meneruskan kehidupan demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya Tionghoa).
- 2) Merestrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk dewan keamanan ekonomi nasional).
- 3) Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai panglima tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang dijabat oleh Rusmanhadi karena tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.
- 4) Pemberian referendum kepada Aceh. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.
- 5) Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua, dan mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora di bawah Bendera Merah Putih.
- 6) Membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres.
- 7) Pada bulan Februari 2000, Abdurrahman Wahid meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP.
- 8) Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan.
- 9) Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.
- 10) Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa

\$4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal *Buloggate*. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang \$2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Skandal ini disebut skandal *Bruneigate*.

c. Akhir Jabatan Presiden Gusdur

Akhir jabatan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung Rapat Paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai Sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai berikut:

1. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001.
2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Republik Indonesia.

K.H. Abdurrahman Wahid meninggal pada umur 69 tahun hari Rabu jam 18.40 WIB tanggal 30 Desember 2009 di RSCM Jakarta, dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

3. Masa Pemerintahan Megawati

a. Awal Pemerintahan Megawati

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5, samapai dengan tahun 2004.

b. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH MEGAWATI

Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negeri sebesar US\$150,80 miliar . Langkah yang ditempuh oleh Megawati untuk mengatasi hal tersebut adalah :



1) Penundaan Pembayaran Pajak

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp116,3 triliun.

Melalui kebijakannya tersebut utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi US\$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

2) Privatisasi BUMN

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN.

Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%.

Faktor yang mendorong penjualan asset indosat :

- 1) Menutupi kekurangan APBN, agar investor terpancing kembali ke Indonesia.
- 2) Kondisi APBN yang minim sehingga tidak memungkinkan pemerintah saat itu untuk menambah peralatan tempur TNI.
- 3) Indonesia dikenai embargo senjata oleh Amerika Serikat sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan suku cadang peralatan perang

Dampak Positif :

- 1) Keuntungan dari penjualan Indosat ini yang juga merupakan liberalisasi telekomunikasi paling utama yaitu hilangnya hambatan-hambatan akses pasar
- 2) Dengan penjualan Indosat ke STT (Temasek), Indosat mendapatkan transfer teknologi yang lebih modern sehingga industri telekomunikasi (Indosat) Indonesia makin melebarkan sayapnya dengan menawarkan dan menyediakan jasa telekomunikasi ke seluruh pelosok negeri yang awalnya jasa telekomunikasi hanya dapat dinikmati di kota-kota besar
- 3) Makin ketatnya persaingan di sektor telekomunikasi yang sekarang banyak dikuasai oleh pihak asing karena aksi privatisasi ini, membuat perusahaan telekomunikasi di Indonesia termasuk Indosat menurunkan tarif telepon dan lain-lain agar tetap memiliki dan menarik pelanggan dan dapat terus bersaing di pasar telekomunikasi

Dampak Negatif :

- 1) Pihak asing yang berinvestasi di Indonesia saat ini tidak mematuhi aturan dan Undang-undang tentang penanaman modal asing bahkan terkesan meremehkan. Pasalnya Kepemilikan STT (Temasek) atas Indosat yang memegang saham sekitar 41% itu bukan satu-satunya investasi perusahaan singapura tersebut, ini dikarenakan Temasek melalui anak usahanya yang lain Singtel (Singapore Telecommunication) juga memiliki saham pada PT. Telkomsel yang notabene milik pemerintah RI.
- 2) Dengan kepemilikan silang Temasek atas PT. Indosat dan PT. Telkomsel ini juga berdampak pada penetapan tarif (*Price Fixing*) antara tarif Indosat dan Telkomsel, sehingga Temasek dapat memonopoli harga yang menyebabkan persaingan tidak sehat antara Indosat dan Telkomsel
- 3) Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan dan diduga pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (*National security*) akan kedaulatan kita pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Kolektif) .

3) MEREALISASIKAN PENDIRIAN KPK

Kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korupsi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara Indonesia menduduki peringkat ke-4. Pada tahun 2003 Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara.

d. Masa Akhir pemerintahan Megawati

Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun. Rakyat merasa tidak puas dengan banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Megawati, seperti privatisasi BUMN, Pembelian Pesawat Sukhoi tanpa persetujuan DPR. Masa Jabatan Megawati berakhir pada tahun 2004 karena masa jabatannya telah habis dan diakhiri dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2004.

4. MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

a. Awal pemerintahan

Pemerintahan Megawati berakhir ketika masa jabatannya habis untuk periode 2001 – 2004. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 Megawati ikut serta dalam bursa pemilihan calon Presiden namun kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa pemerintahannya. Akan tetapi ketika mencalonkan diri sebagai Presiden dan karena kerap berseberangan politik dengan Megawati maka SBY mengundurkan diri dari jabatan Menhankam, kemudian mendirikan Partai Demokrat. SBY bersama Partai Demokrat berhasil memenangkan Pemilu tahun 2004 dengan 61 % suara setelah berkoalisi dengan PKS dan Golkar.

b. Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

- 1) Menutup hutang kepada Paris Club sebesar US \$ 136,6 Milyar maka SBY mengeluarkan kebijakan berupa menambah hutang ke CGI sebesar US \$ 3,4 Milyar
- 2) Pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga “ BBM Mewah “ yang dialokasikan untuk dana Pendidikan dan menutup hutang Luar Negeri
- 3) Melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati dan berhasil menekan inflasi sebesar 0,56 %
- 4) Sedikit demi sedikit menarik Dana Susidi Migas yang selama ini membebani pemerintah.
- 5) Meningkatkan harga Indeks Saham Gabungan
- 6) Mengandalkan pembangunan infrastruktur Massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi
- 7) Meningkatkan kampanye Anti Korupsi, mengeluarkan Kep Pres percepatan penindakan Korupsi dan melakukan tindakan kongkret

c. Kebijakan Politik Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono

- 1) Memantapkan penghapusan Dwi Fungsi ABRI

- 2) Melaksanakan Pemberantasan Korupsi dengan menahan Pejabat Pejabat yang terlibat Korupsi tidak kurang dari Aulia Pohan (Gubernur BI) yang merupakan menantunya sendiri.
- 3) Memperpanjang Darurat Sipil dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM di Helsinki melalui perantara Crisis Management Initiative di bawah pimpinan Marri Ahtisari

d. Akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah 2 periode masa pemerintahannya tahun 2004 – 2009 dan periode tahun 2014, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir . sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 7 tentang masa jabatan Presiden yang dibatasi untuk 2 periode

C. Rangkuman

Perkembangan politik di masa Reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, dimana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan, pada kesempatan kali ini kita hanya akan merangkum Perkembangan politik di masa Reformasi pada saat pemerintahan B.J Habibie dan Abdurahman Wahid.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menelan 18 korban jiwa. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan media massa. Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan secara bergelombang, seperti Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas.

Namun setelah Habibie membebaskan banyak tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya yang memperbolehkan Timor Timur untuk menggelar referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari pangkuan Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Namun di akhir pemerintahan Habibie, pemilu tahun 1999 dapat terlaksana dengan baik meskipun pengesahan hasil Pemilu sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator signifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman.

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Sukarnoputri keluar sebagai pemenang pada pemilu parlemen dengan memperoleh 34% dari seluruh suara, Golkar (partai Soeharto – yang selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) mendapat 22% suara, Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%, Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Kemudian pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid / Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun.

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

D. Latihan Soal

1. Sebutkan pengertian Reformasi
2. Sebutkan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia!
3. Deskripsikan reformasi dalam tubuh ABRI pada masa reformasi!
4. Sebutkan beberapa ketetapan baru pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998!
5. Sebutkan sepuluh besar partai pemenang pemilu tahun 2004!

KUNCI JAWABAN

NO SOAL	KUNCI JAWABAN
1	Secara umum, pengertian reformasi ialah suatu proses perubahan atau juga pembentukan kembali suatu tatanan (bentuk/susunan) kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan (bentuk/susunan) kehidupan yang baru.

	<p>Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa arti reformasi ini merupakan proses pembentukan atau juga perubahan sistem yang telah/sudah ada pada sebuah masa diganti dengan yang baru. Perubahan serta juga perbaikan tersebut utamanya itu dilakukan pada beberapa bidang diantaranya bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, serta juga pendidikan.</p> <p>Sedangkan didalam KBBI, pengertian reformasi merupakan suatu perubahan yang terjadi dengan secara drastis yang mana tujuannya itu ialah untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, serta ekonomi, didalam suatu masyarakat atau juga negara.</p>
2	<p>Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia di antaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang diisyaratkan oleh IMF; merekonstruksi perekonomian Indonesia; merekapitulasi perbankan dan melikuidasi beberapa bank yang bermasalah; menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp10.000,00.
3	<p>Pada masa reformasi, ABRI mulai menarik diri dari berbagai posisi sipil. Peran dan jumlah perwakilan ABRI di DPR mulai dikurangi secara bertahap hingga akhirnya keluar dari keanggotaan DPR. Mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Dengan demikian, ABRI menjadi terdiri atas Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Istilah ABRI pun diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).</p>
4	<p>Ketetapan baru pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
5	<p>Sepuluh besar pemenang pemilu 2004, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).</p>

E. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

NO	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah kalian dapat menyebutkan tentang DASAR HUKUM BJ Habibie		

	menjadi presiden menggantikan Bapak Soeharto yang belum habis masa jabatannya?		
2	Apakah kalian dapat menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie dalam kehidupan Ekonomi demi menyelamatkan negara Indonesia selama krisis melanda?		
3	Apakah kalian dapat menjelaskan kebijakan dilakukan BJ Habibie dalam bidang politik demi mengatasi kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah?		
4	Apakah kalian dapat menceritakan tentang hasil pemilu yang dipercepat tahun 1999?		
5	Apakah kalian dapat menceritakan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Abdurahman Wahid yang dikatakan sering kontroversi sehingga berakhir dengan lengsernya presiden ke empat tersebut?		

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

EVALUASI

Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang kalian anggap tepat

1. Munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk:
 - A. memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - B. mewujudkan masyarakat adil makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945
 - C. melindungi sgenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - D. memajukan kesejahteraan umum

- E. mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari:
 - A. Ketua PBB
 - B. Mahasiswa
 - C. DPR
 - D. MPR
 - E. MA
 3. Presiden Soeharto mengumumkan pemberhentian dirinya pada Tanggal:
 - A. 13 Mei 1998
 - B. 14 Mei 1998
 - C. 17 Mei 1998
 - D. 21 Mei 1998
 - E. 22 Mei 1998
 4. Berikut ini adalah mahasiswa yang dikenal sebagai Pahlawan Reformasi, kecuali:
 - A. Elang Mulya Lesmana
 - B. Arif Rahman Hakim
 - C. Hafdin Royan
 - D. Hendriawan Sie
 - E. Heri Hartanto
 5. Dampak dari tewasnya 4 mahasiswa Tri Sakti pada tanggal 12 Mei 1998 adalah:
 - A. munculnya gelombang aksi solidaritas yang berujung pada kerusuhan Mei 1998
 - B. terjadi krisis sosial yang menyebabkan terpecahbelahnya masyarakat Indonesia
 - C. beban anggaran negara bertambah karena harus menyelesaikan kekisruhan akibat demonstrasi
 - D. kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa meningkat drastis
 - E. muncul konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap universitas sebagai penyelenggara pendidikan
 6. Tragedi Trisakti telah menyulut terjadinya peristiwa anarkhis tanggal 13 dan 14 Mei 1998, yakni.....
 - A. pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa yang disukung masyarakat
 - B. penyerbuan kantor pusat PDI yang diduga dilakukan oleh kelompok PDI pimpinan Suryadi
 - C. pembakaran terhadap mobil-mobil mewah milik para pejabat yang dianggap pro kapitalisme
 - D. kerusuhan dan penjarahan ribuan tempat tinggal, kantor-kantor, pertokoan dan kendaraan-kendaraan terutama milik keturunan Cina
 - E. peristiwa penculikan para aktivis Mahasiswa dan tokoh-tokoh LSM oleh intelijen pemerintah orde baru
 7. Agenda Reformasi yang muncul pasca krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 berisi tuntutan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Berikut yang tidak termasuk agenda Reformasi 1998 adalah:
 - A. bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya
 - B. hapuskan dwifungsi ABRI
 - C. kembali ke UUDS 1950 dan bentuk DPRS
 - D. tegakkan supremasi hukum dan HAM
 - E. hapuskan praktik KKN

8. Berikut ini adalah beberapa alasan penolakan terhadap kepemimpinan B.J. Habibie, kecuali:
 - A. B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Suharto
 - B. secara hukum formal pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional
 - C. kepemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru
 - D. B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung
 - E. B.J. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN

9. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan langkah-langkah reformasi sejak awal kepemimpinannya. salah satunya menghapus dua kementerian yang dianggap pangkal korupsi dan menyumbat kebebasan berpendapat, yaitu:
 - A. Departemen sosial dan departemen agama
 - B. Departemen sosial dan departemen penerangan
 - C. Departemen pendidikan dan departemen pertanian
 - D. Departemen pertahanan keamanan dan departemen kelautan
 - E. Departemen pendidikan dan departemen sosial

10. Presiden yang memimpin Indonesia pada masa Reformasi secara berurutan antara lain:
 - A. SBY, Gusdur, Megawati, BJ Habibie
 - B. BJ Habibie, Megawati, Gusdur, SBY
 - C. Megawati, Gusdur, BJ Habibie, SBY
 - D. Gusdur, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, BJ Habibie
 - E. BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

1. Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
Gerakan Reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa bertujuan untuk mengembalikan tatanan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara yang sudah menyimpang pada masa Orde Baru

2. Kunci Jawaban : B
Pembahasan :

Reformasi di gerakan oleh Mahasiswa didukung oleh elemen elemen LSM yang selama masa Orde Baru mendapat tekanan kebebasan berpendapat, majalah dibredel dll.

3. Kunci Jawaban : D

Pembahasan :

Akibat adanya desakan dari para mahasiswa dan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 19.06 WIB Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi presiden Republik Indonesia

4. Kunci Jawaban : B

Pembahasan :

Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan dengan aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march menuju gedung DPR/MPR. Dalam insiden tersebut empat mahasiswa tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Empat mahasiswa tersebut adalah: Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Mereka mendapat gelar Pahlawan Reformasi.

5. Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Kejadian Tri Sakti yang ditandai tewasnya 4 mahasiswa memicu terjadinya kerusuhan massa pada tanggal 13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia

6. Kunci Jawaban : D

Pembahasan :

Pascatragedi Trisakti suasana di Jakarta sangat tegang, hingga digelarnya aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 19 Mei 1998 oleh para mahasiswa. Mereka melakukan Long March menuju gedung DPR/MPR dengan tujuan menuntut turunnya Presiden Soeharto, menggelar Sidang istimewa MPR, dan pelaksanaan reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara.

7. Kunci Jawaban : C

Pembahasan :

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998 ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah-masalah sosial. Dengan kondisi seperti itu mengundang keprihatinan rakyat, yang akhirnya memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi.

Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Amandemen UUD 1945.
3. Penghapusan dwifungsi ABRI.
4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
5. Supremasi hukum.
6. Pemerintahan yang bersih dari KKN.

8. Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum. Dalam suasana Sidang Umum MPR yang digelar dibawah pimpinan Ketua MPR Amien Rais, tanggal

14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang dan terjadi penolakan terhadap pertanggung jawaban presiden sebagai Mandataris MPR lewat Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.

Masalah-masalah yang dipersoalkan oleh Fraksi-fraksi tersebut adalah masalah Timor-Timur yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari NKRI , masalah KKN termasuk pegusutan kekayaan Soeharto, dan masalah HAM dalam tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan 2

9. Kunci Jawaban : B

Pembahasan :

Merestrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk dewan keamanan ekonomi nasional).

10. Kunci Jawaban : E

Pembahasan :

Pemerintahan masa Reformasi secara berturut turut adalah ; BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono

DAFTAR PUSTAKA

Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XII. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Darini, Ririn, dkk. 2013. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Kurikulum Jakarta. Penerbit Cempaka Putih.

Hapsari, Ratna & M Adil. 2016. Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA Kelas XII Kelompok Wajib. Jakarta. Penerbit Erlangga.

<http://blogjejaksejarah.blogspot.com/2013/04/makalah-reformasi.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://tata-muhtadin.blogspot.com/2011/12/reformasi-di-indonesia.html>

<https://dianpratamasurya.wordpress.com/2012/05/20/sejarah-dan-kronologi-reformasi-indonesia-1998/>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/uni-lubis/kronologi-reformasi-mei-1998-terjungkalnya-kekuasaan-soeharto-1>

<https://blog.ruangguru.com/mengenal-masa-reformasi-di-indonesia>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Indonesia XII:2018